

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan ini). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
2. Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2020 pada praktiknya telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
3. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menerapkan seluruh kebijakan dan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi ada kendala dan hambatan dalam penerapannya, yaitu : keterbatasan kemampuan dalam bidangnya dan masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada tahun anggaran berikutnya sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyajian laporan keuangannya tetap konsisten berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga penyajian Laporan Keuangan Daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan Daerah yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan laporan tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus sering mengadakan sosialisasi, pendidikan serta pelatihan kepada para staf terkait PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pada tahun anggaran berikutnya, kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- BPKP. (2002). *Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dwi Widjayanti, Nicky. 2010. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang Diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007*.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan. Artikel*. <http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi S. Muhammad. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi, Pramono., Yanuar E. Restianto., Icuk Ranga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Heriawati Simanihuruk, Melly. 2013. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- I Bagus Surya Negara. 2015. *Toward implementation of accrual basis in Indonesia government key success factors*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.
- International Public Sector Accounting Board. 2011. *International Public Sector Accounting Standards*. London: International Public Sector Accounting

Board.

- Kieso, Donald E. Dkk. 2008. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 .  
Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*.  
Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta.
- KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis AkruaI Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. *Bahan Bahasan Untuk LimitedHearing*, Jakarta. KSAP.2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang *pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, Iexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.  
Bandung.
- Pemerintah RI, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.
- Pemerintah RI, 2012. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang*.
- Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah RI, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- Pemerintah RI, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah RI, 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 64/20103 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah RI, 2012. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang

*Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja*

- Pemerintah RI, 2013. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*.
- Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik*. ([www.iaiglobal.or.id/tentang\\_iai\\_download.php?id=66&kfile=1](http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai_download.php?id=66&kfile=1)).
- Simanjuntak, 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres IX Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 9 Desember 2010.
- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar* Buku 1. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta